

EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023

Shalaisya Azzahra Al-Meyda Hermawan¹; Yayan Nuryanto²; Agus Taryana³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Email : shalaisya21001@mail.unpad.ac.id¹; yayan.nuryanto@unpad.ac.id²; agus.taryana@unpad.ac.id³

Submitted: 11-06-2025; Accepted: 01-07-2025; Published : 11-07-2025

ABSTRAK

Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh.

Kata kunci ketahanan pangan, bantuan bibit tanaman padi, kelompok tani, sosialisasi.

ABSTRACT

The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program's effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting

factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.

Key word: food security, rice seedling assistance, farmer groups, socialization

PENDAHULUAN

Pangan merupakan hal mendasar yang merupakan kebutuhan manusia, mencakup makanan serta minuman yang dapat dikonsumsi berupa hasil sumber hayati ataupun air. Termasuk bahan lainnya meliputi bahan dasar pangan dan bahan tambahan pangan yang dapat diproses dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan hak setiap warga negara, di mana negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak atas pangan dan akses terhadap pangan.

Sebagai tonggak utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perwujudan hak, dimana negara memiliki kewajiban dalam memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan pemenuhan pangan yang memiliki nilai gizi. Ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tercukupinya pangan yang berasal dari hasil pertanian dan cadangan lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketersediaan pangan termasuk tanggung jawab dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi lokal. Maka dalam memenuhi ketersediaan pangan dapat dilaksanakan melalui pengembangan dari produksi pangan, kemampuan dalam sistem usaha sektor pangan, pengembangan infrastruktur pendukung dalam ketahanan pangan, pengembangan lahan produktif, serta membangun kawasan pusat produksi pangan untuk memanfaatkan potensi daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan pangan dari waktu ke waktu.

Pentingnya pangan bagi masyarakat, maka upaya pemerintah dalam memperkuat pangan dan ketersediaan pangan, dengan menetapkan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan. Program ini merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sektor yang diharapkan memiliki kontribusi serta dampak mendasar terhadap pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan masyarakat secara umum, dan juga pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan program ketahanan pangan juga memiliki tujuan dalam mewujudkan swasembada pangan, keamanan pangan, cadangan pangan nasional dan daerah sebagai langkah dalam menghadapi masalah-masalah meliputi kekurangan ketersediaan pangan, gangguan dalam persediaan pangan dan harga yang tinggi, serta keadaan genting lainnya yang dapat memberikan dampak buruk.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024, bahwa pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik secara mendasar namun juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya ketahanan pangan dapat ditingkatkan berdasarkan ketersediaan pangan dimana keterjangkauan pangan serta kualitas juga keamanan pangan menjadi tolak ukur dalam sukses ketahanan pangan. Untuk itu, dalam program ketahanan pangan, ketersediaan pangan termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketahanan pangan menjadi program prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan permintaan pangan secara merata dan berkelanjutan di Indonesia dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal setiap daerah.

Sebagai wujud dari implementasi di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah menegaskan pentingnya ketahanan pangan di tingkat lokal. Salah satu strategi dalam regulasi tersebut adalah penganeekaragaman pangan dalam peningkatan aspek ketersediaan serta konsumsi pangan berlandaskan pada potensi sumber daya lokal. Pada pasal 25 dari peraturan tersebut, dalam huruf f menekankan pentingnya meningkatkan ketersediaan serta akses benih atau bibit tanaman sebagai strategi untuk peningkatan ketahanan pangan berupa mengembangkan usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Desa Bojongkoneng adalah desa yang berada di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ditinjau letak

secara geografis, Desa Bojongkoneng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Salah satu potensi desa yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah luas lahan pertanian mencapai 279,40 Ha yang jika digunakan sesuai dengan program ketahanan pangan maka akan memberikan kontribusi kepada masyarakat desa.

Tabel 1. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun 2023

Cabe	20,00 Ha	6,00 Ton/Ha
Tomat	13,00 Ha	40,00 Ton/Ha
Kubis	12,00 Ha	60,00 Ton/Ha
Mentimun	6,00 Ha	60,00 Ton/Ha
Kacang Panjang	4,00 Ha	28,00 Ton/Ha
Padi Sawah	279,00 Ha	6,40 Ton/Ha

Sumber: Olahan penulis, 2025.

Berdasarkan tabel 1, padi sawah mendominasi luas lahan pertanian di Desa Bojongkoneng dengan angka mencapai 279,00 Ha dengan hasil produksi per-tahun sebanyak 1.785,6 ton. Luas dan hasil produksi ini jauh melebihi untuk komoditas tanaman pangan lain seperti cabe, tomat, kubis, mentimun, dan kacang panjang yang hanya berkisar di 4,00 - 20,00 Ha. Maka dari itu, Pemerintah Desa Bojongkoneng dapat menjadikan padi sebagai sektor utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya.

Mengacu pada potensi yang dimiliki, Pemerintah Desa Bojongkoneng berserta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di Desa Bojongkoneng untuk menetapkan program dalam mendukung program ketahanan pangan. Salah satu program yang disetujui dan dilaksanakan adalah program bantuan pemberian bibit tanaman padi dengan tujuan mendukung pertanian tanaman pangan yaitu padi sawah yang ada di Desa Bojongkoneng, meningkatkan hasil produktivitas padi sawah, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program bantuan bibit tanaman padi merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai bentuk dukungan dari pelaksanaan program ketahanan pangan. Program ini membantu petani dengan menyediakan bibit padi yang berkualitas secara subsidi, dimana petani dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah desa, sehingga dapat meringankan beban biaya petani dan bertujuan juga untuk meningkatkan hasil pertanian yang berkualitas. Bibit padi merupakan benih padi yang telah melalui proses penyemaian dan tumbuh berubah menjadi tanaman muda, yang sudah siap untuk dipindahkan ke lahan sawah untuk selanjutnya melalui proses tanam. Bibit padi yang berasal dari benih unggul akan lebih siap ditanam. Maka dari itu, bibit unggul yang telah tumbuh dan siap tanam akan mempercepat proses pertumbuhan tanaman padi di lahan, dikarenakan

telah melewati tahap perkecambahan dan sudah membentuk struktur dasar tanaman.

Melalui program bantuan pemberian bibit tanaman padi, petani dapat lebih mudah memulai proses penanaman tanpa harus menunggu proses semai dari benih padi. Selain itu, penggunaan bibit siap tanam juga dapat meningkatkan efektivitas pertanian dan produktivitas hasil panen. Program bantuan bibit tanaman padi diharapkan mampu memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan produksi pangan di tingkat lokal.

Namun, dalam pelaksanaannya, program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi keterlambatan distribusi bibit tanaman padi kepada penerima bantuan, sumber daya manusia yang kurang terampil dalam mengelola maupun menerima program ketahanan pangan, serta kurangnya partisipasi petani dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Terdapat riset terdahulu yang meneliti terkait dengan efektivitas program ketahanan pangan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nurjakiah, Agus Surya Dharma, Djayeng Turano Gunade (2024) dengan judul "*Efektivitas Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Program bantuan Benih Tanaman Padi)*". Pada riset ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data berupa analisis dengan kondensasi data. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari program ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa Pupuyuan dengan studi kasus program bantuan benih tanaman padi. Hasil dari penelitian berupa program ketahanan pangan masih kurang efektif terlihat berdasarkan indikator sosialisasi program, pemahaman program, dan implementasi program.

Dengan demikian, pada penelitian ini akan melihat dan menganalisis bagaimana efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat menggunakan teori efektivitas program. Dengan menggunakan efektivitas program maka akan terlihat apakah program tersebut sudah berhasil dan memberikan manfaat berdasarkan tujuan yang sudah direncanakan. Untuk mengukur efektivitas program ketahanan pangan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) yaitu program yang telah dilaksanakan bisa dikatakan efektif apabila program tersebut dapat memenuhi 5 indikator, yaitu:

1. Pemahaman program merupakan indikator dalam menentukan apakah pelaksana dan sasaran program memahami maksud, teknis, dan tujuan dari program.
2. Ketepatan waktu merupakan indikator

dalam melihat apakah pelaksanaan program sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, dikarenakan semakin tepat waktu program, maka akan berpengaruh terhadap hasil dari program tersebut.

3. Ketepatan sasaran merupakan indikator dalam menentukan pihak yang menjadi tujuan dari program. Dalam penentuan sasaran ini dilaksanakan oleh individu maupun organisasi yang tepat, dikarenakan akan menentukan keberhasilan suatu program.
4. Pencapaian tujuan merupakan indikator dalam menentukan apakah program yang sudah dilaksanakan berdasarkan dengan tujuan dan juga sudah memberikan manfaat kepada sasaran program.
5. Perubahan nyata merupakan indikator dalam menentukan apakah sebuah program dapat memberikan dampak dan perubahan nyata secara langsung kepada sasaran program.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Di mana metode ini digunakan dalam memaparkan sebuah makna dari suatu peristiwa yang ditemukan di lapangan lalu diolah menjadi informasi yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap situasi yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sample*. Menurut Sugiyono (2023), pertimbangan informan dalam *purposive sample* didasarkan kepada pengetahuan informan terhadap objek dan situasi sosial yang sedang diteliti. Oleh karena itu, terdapat 6 informan dalam penelitian ini, meliputi Kepala Desa Bojongkoneng, Sekretaris Desa Bojongkoneng, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongkoneng, Kepala Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan dua orang masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani penerima bantuan bibit tanaman padi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen berupa mempelajari berdasarkan dokumen yang sudah ada, observasi suatu objek secara langsung, dan wawancara terstruktur kepada para informan. Dengan teknik analisa data berdasarkan Michael Hubberman dan Matthew Miles (dalam sugiyono, 2022), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan lalu dilakukan teknik validasi data dengan triangulasi sumber yaitu langkah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari data berupa peninjauan data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dapat diukur menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2010), sebagaimana dikutip dalam Amalia *et al.* (2024), meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

a. Pemahaman program

Dalam indikator pemahaman program maka penerima dan pengelola program memiliki pemahaman yang sama terkait dengan program yang dilaksanakan. Pemerintah Desa Bojongkoneng memiliki peranan penting dalam memastikan informasi terkait program ketahanan pangan berupa bantuan pemberian bibit tanaman padi dapat tersampaikan dengan baik kepada petani.

Maka salah satu bentuk tugas serta tanggung jawab dari pemerintah desa terkait hal ini adalah menyampaikan informasi secara terbuka dan merata. Sehingga petani memiliki pemahaman terkait dengan maksud dan tujuan program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi sebagai landasan bahwa petani mengetahui teknis dari program tersebut. Upaya yang dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dengan media sosial milik Pemerintah Desa Bojongkoneng dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin kepada petani bersama dengan Gapoktan.

Namun, dalam satu periode pelaksanaan program ketahanan pangan, sosialisasi hanya dilaksanakan dua kali dengan rentang waktu enam bulan, dan tidak semua anggota kelompok tani dapat menghadiri sosialisasi dikarenakan diberlakukan sistem perwakilan dalam menghadiri sosialisasi ataupun bimbingan teknis. Oleh karena itu, pemahaman petani terkait dengan adanya program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi menjadi kurang dan petani hanya mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan program tanpa mengetahui tujuan dari program tersebut diberikan untuk apa. Ketidakhadiran sebagian petani dalam sosialisasi menjadi kendala, dimana dalam hal ketahanan pangan, petani merupakan pihak yang secara langsung terdampak dan menjadi sasaran dari program.

Minimnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi serta belum meratanya penyebaran informasi terkait dengan program ketahanan pangan berupa bantuan tanaman padi menjadi salah satu tantangan Pemerintah Desa Bojongkoneng. Dikarenakan jika petani kurang memahami terkait dengan tujuan dan mekanisme dari program tersebut, maka akan menentukan dan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Media sosial dapat digunakan dalam menyebarkan informasi terkait dengan ketahanan

pangan ataupun sosialisasi. Pemerintah Desa Bojongkoneng perlu meningkatkan intensitas, cakupan, dan strategi penyampaian informasi melalui media sosial agar seluruh petani mendapatkan informasi yang sama dan tidak ada ketimpangan informasi antara satu sama lain.

Oleh karena itu sesuai dengan indikator terkait dengan pemahaman program maka program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Maka program belum dapat dikatakan efektif dilaksanakan di Desa Bojongkoneng.

b. Ketepatan Sasaran

Dalam indikator ketepatan sasaran menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan penerima bantuan program, baik ditentukan secara individu maupun organisasi. Penerima bantuan program merupakan pihak yang berhak menerima dan telah sesuai dengan kriteria serta syarat dari program tersebut. Dikarenakan ketepatan dalam penentuan sasaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program bantuan bibit tanaman padi.

Penentuan sasaran program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi ditentukan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, BPD, dan Gapoktan. Pihak yang menentukan pemberian bantuan menyampaikan bahwa penerima bantuan bibit tanaman padi merupakan kelompok tani yang sudah tergabung di Gabungan Kelompok Tani di Desa Bojongkoneng. Namun, terdapat syarat lain yaitu berupa kelompok tani penerima program merupakan kelompok tani yang sudah terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas berupa NIB. Oleh karena itu, jika petani menginginkan pengajuan bantuan dari pemerintah desa, petani harus memiliki kelompok tani terlebih dahulu dan juga sudah tergabung dalam Gapoktan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Bojongkoneng pada Tahun 2023 sasaran program bantuan pemberian bibit tanaman padi hanya diberikan kepada satu kelompok tani yaitu kelompok tani ternak padi sari. Kelompok tani ternak padi sari adalah salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani di Desa Bojongkoneng

Kelompok tani ternak padi sari dibentuk pada tanggal 3 November 2022 dan melewati proses pengukuhan oleh pemerintah Desa Bojongkoneng pada tanggal 5 Desember 2022. Oleh karena itu, kelompok tani ternak padi sari berhak menerima bantuan pemberian bibit tanaman padi dari Desa Bojongkoneng dikarenakan sudah resmi terdaftar sebagai kelompok tani dan memiliki legalitas.

Dalam penerimaan bantuan program bibit tanaman padi, pada tahun 2022 kelompok tani ternak padi sari mengajukan proposal permohonan bantuan bantuan bibit padi kepada pemerintah Desa Bojongkoneng. Dengan struktur proposal sebagai berikut:

- **Latar Belakang**
Dijelaskan terkait dengan pentingnya produktivitas pertanian termasuk ketersediaan bibit unggul dan pupuk dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- **Masalah**
Dijelaskan terkait dengan permasalahan seperti keterbatasan dana bagi kelompok, terdapat lahan namun belum bisa dioptimalkan, kesulitan dalam mendapatkan benih berkualitas dan unggul, serta terbatasnya fasilitas dan kelengkapan penunjang pertanian.
- **Maksud dan Tujuan**
Dijelaskan maksud dari program yaitu agar petani dapat mengalokasikan lahannya untuk membudidayakan padi dengan bibit unggul. Memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi dan meningkatkan kualitas hasil panen.
- **Pemecahan masalah**
Dijelaskan bahwa kelompok memohon pembinaan dari pemerintah Desa Bojongkoneng dan pendampingan serta bantuan sarana dan prasarana.
- **Tempat pelaksanaan**
Dijelaskan dimana program bantuan bibit tanaman padi akan dilaksanakan oleh kelompok tani ternak padi sari.
- **Rencana kebutuhan sarana produksi**
Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan kelompok tani ternak padi sari sebagai berikut
- **Susunan kelompok**
Disebutkan nama serta peran dalam kelompok tani seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok.
- **Penutup**

Oleh karena itu kelompok tani ternak padi sari sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima bantuan program pemberian bibit tanaman padi, sehingga dalam indikator ketepatan sasaran, pelaksanaan program sudah tergolong efektif dan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan bibit tanaman padi.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu sebuah program disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program agar dapat memberikan manfaat. Dalam hal program bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, ketepatan waktu berkaitan erat dengan distribusi bibit tanaman padi oleh pemerintah desa kepada kelompok tani yang menjadi sasaran program bantuan bibit tanaman padi. Karena jika pemerintah desa memberikan bibit pada waktu yang tidak tepat maka kelompok tani tidak bisa memanfaatkan bibit secara langsung. Namun, jika kelompok tani menggunakan bibit yang diberikan pada masa tanam setelahnya, diperlukan

bimbingan terkait penyimpanan bibit oleh pemerintah desa. Salah satu keberhasilan dalam panen padi adalah bergantung kepada cara petani menyimpan bibit padi sawah.

Penyimpanan bibit tanaman padi harus dilaksanakan dengan tepat agar tidak menurunkan kualitas dan keunggulan bibit. Jika bibit diberikan kepada petani setelah petani menanam padi, maka pemerintah desa harus memberikan sosialisasi terkait dengan penyimpanan bibit yang baik dan benar agar tidak merusak kualitas dari bibit. Pertumbuhan dan perkembangan bibit padi kurang baik atau menjadi terlambat yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan padi pada pertanaman yang akhirnya dapat menurunkan produksi (Suparto, H., Nugraha, M. I., & Kulu, I. P. (2022)).

Dalam hal ini, Pemerintah Desa Bojongkoneng menyampaikan bahwa bantuan bibit tanaman padi telah diberikan kepada kelompok tani ternak padi sari pada bulan April 2023. Namun, berdasarkan laporan penggunaan anggaran pada tahun 2023, diketahui bahwa pelaksanaan di lapangan, terkhususnya untuk distribusi bantuan bibit tanaman padi, baru terealisasi pada bulan Mei 2023. Pelaksanaan yang terlambat akan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan jadwal musim tanam yang ditetapkan oleh petani. Sehingga bibit padi yang diterima kelompok tani tidak dapat langsung ditanam dan tidak memberikan manfaat kepada petani. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya sinkronisasi antara pelaksanaan program di lapangan.

Dalam distribusi bibit waktu akan menentukan efektivitas program dikarenakan petani sudah memiliki waktu dalam masa bertanam. Jika Pemerintah Desa Bojongkoneng memberikan bantuan bibit telat, maka tidak akan memberikan manfaat secara langsung kepada petani. Oleh karena itu, efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi berdasarkan indikator ketepatan waktu pemberian bibit tanaman padi masih tergolong belum efektif.

d. Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan melihat bagaimana pelaksanaan apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dan bagaimana pemerintah Desa Bojongkoneng sebagai penyelenggara program telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Namun, berdasarkan pernyataan dari pihak Desa Bojongkoneng, bahwa belum ada indikator dalam melihat hasil program ketahanan pangan. Petani juga menambahkan bahwa kebutuhan mereka di sektor pertanian belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah desa dalam mendukung sektor pertanian padi sawah.

Sesuai dengan tujuan program ketahanan pangan nasional, bahwa bantuan bibit tanaman padi dapat mendukung swasembada pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan yang akan berhasil jika pemerintah turut memenuhi dan menyediakan

sarana dan prasarana mendukung dalam melaksanakan pertanian.

Pada tahun 2023, realisasi bantuan bibit tidak sesuai dengan permintaan kelompok tani. Dalam pembuatan proposal, kelompok tani sudah mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dari lahan pertanian yang dimiliki. Namun, Pemerintah Desa Bojongkoneng hanya bisa menyiapkan kurang dari permintaan kelompok petani. Ketidaksesuaian antara permintaan dan realisasi bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.

Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian swasembada pangan, sebagaimana yang ada dalam tujuan program ketahanan pangan nasional. Dikarenakan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai juga turut menjadi kendala dalam mencapai hasil tujuan yang optimal dari program. Dalam menghasilkan padi yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan bibit padi yang unggul namun juga dari bantuan pendukung lainnya seperti pupuk dan juga obat-obatan agar tanaman terhindar dari hama.

Oleh karena itu, dalam aspek pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa program bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng belum dapat dikatakan efektif. Diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme program serta penetapan indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaan program di masa mendatang lebih terarah.

e. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata digunakan untuk menilai sejauh mana program membawa dampak langsung kepada petani penerima manfaat. Dalam konteks program bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, indikator ini menilai apakah program telah menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi petani dari sisi hasil produksi. Berdasarkan wawancara, program ini dinilai meringankan beban biaya pembelian bibit bagi petani, namun belum mampu meningkatkan hasil panen secara merata.

Meskipun ada petani yang mengalami peningkatan hasil panen, namun ada juga yang menyatakan bahwa hasilnya cenderung sama seperti panen sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program belum memberikan dampak yang merata dan signifikan. Terlihat pada tabel di bawah terkait dengan hasil produksi padi sawah pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 2. Hasil Produksi Padi Sawah Tahun 2022

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Padi Sawah	279	6.4

Sumber: Prodeskel Perkembangan Tahun 2022

Tabel 2 menyajikan data berdasarkan PRODESKEL Perkembangan, bahwa hasil produksi padi sawah Desa Bojongkoneng pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, produksi padi sawah di desa mencapai 6.4 ton per hektar dengan luas lahan produksi sebesar 279 ha. Hal ini menandakan bahwasanya lahan padi sawah di Desa Bojongkoneng tergolong produktif dalam menghasilkan padi.

Tabel 3. Hasil Produksi Padi Sawah Tahun 2023

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Padi Sawah	279	6.4

Sumber: Prodeskel Perkembangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 data PRODESKEL Perkembangan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa hasil produksi padi sawah di Desa Bojongkoneng masih menunjukkan angka yang sama yaitu 6,40 ton/Ha, dengan luas lahan yang tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 279 hektar. Lahan padi sawah masih tergolong efektif namun tidak adanya peningkatan hasil panen ini menjadi indikator bahwa program bantuan bibit tanaman padi belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Desa Bojongkoneng.

Maka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi sebagai berikut:

1. Faktor pendukung program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng adalah potensi lokal berupa sumber daya alam yang berpotensi jika dipergunakan secara maksimal. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Desa memiliki tugas dalam mengelola sumber daya alam, maka dari itu desa yang aktif dan kreatif dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memberikan manfaat. Oleh karena itu, berdasarkan posisi geografis, Desa Bojongkoneng menunjukan potensi sumber daya alam yang dapat mendukung kemajuan pertanian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Luas lahan padi sawah yang melebihi tanaman pangan yang lain, dapat dimanfaatkan secara maksimal yaitu berupa peningkatan penghasilan padi.

Potensi sumber daya alam ini didukung dengan program yang diadakan oleh pemerintah yaitu bantuan pupuk, bantuan obat-obatan untuk tanaman, serta JUT (Jalan Usaha Tani) yang memudahkan mobilisasi petani dalam

mengangkut hasil pertaniannya.

Selain itu, keberadaan Gapoktan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, yaitu bantuan berupa pengesahan atau legalitas dari pemerintah desa untuk para kelompok tani agar dapat menerima berbagai bantuan, seperti bantuan bibit tanaman. Dengan hal ini kelompok tani di Desa Bojongkoneng sudah terdaftar resmi di SIMLUHTAN dan memiliki NIB untuk mendukung usaha pertanian. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah desa dan gapoktan menjadi kunci utama dan pendukung untuk menunjang keberhasilan program ketahanan pangan di tingkat desa.

Gabungan Kelompok Tani merupakan organisasi di desa yang memberikan ruang bagi kelompok tani untuk berkoordinasi dan berjalan dengan aktif. Salah satu peran Gapoktan adalah membantu kelompok tani dalam mengatasi dan memberikan bantuan kepada kelompok tani jika terdapat kesulitan dan juga memberikan arahan kepada kelompok tani. Gapoktan juga mendukung upaya Pemerintah Desa Bojongkoneng dalam penyaluran bantuan.

2. Faktor Penghambat yang ada dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi adalah kurangnya keterampilan sumber daya manusia, baik dari pihak pengelola maupun penerima program bantuan bibit tanaman padi. Keterbatasan ini mencakup kecakapan dalam mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya kegiatan sosialisasi serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program bantuan bibit tanaman padi juga masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa tanaman padi bukan merupakan komoditas utama dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Di Desa Bojongkoneng, padi hanya dianggap sebagai komoditas kedua, karena masyarakat lebih memilih komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi untuk kesejahteraan. Hal ini turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian padi sawah.

Pemerintah Desa Bojongkoneng terus berupaya dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program yaitu dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Juga melakukan pemberdayaan dengan memandirikan kelompok tani dengan mendaftarkan melalui Nomor Induk

Berusaha (NIB) di mana kelompok tani dapat melakukan usaha sesuai dengan pertaniannya secara legal.

Walaupun padi sawah merupakan komoditas kedua di Desa Bojongkoneng. Tetapi dalam pemberian bantuan bibit tanaman padi, Pemerintah Desa Bojongkoneng memperhatikan kualitas dan spesifikasi bibit sesuai yang dibutuhkan oleh kelompok tani sebagai penerima bantuan. Hal ini penting dilakukan, karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik tanah yang bervariasi sehingga akan membutuhkan bibit yang berbeda juga.

SIMPULAN

Program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng belum memenuhi indikator efektivitas program dengan menggunakan lima indikator di antaranya adalah pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Pemahaman program ketahanan pangan belum dinilai efektif, dikarenakan penerima bantuan yaitu petani dalam kelompok tani tidak mengetahui maksud dan tujuan program ketahanan pangan. Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dapat dinilai efektif, kelompok tani ternak padi sari sebagai sasaran program telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima program bantuan bibit tanaman padi. Ketepatan waktu program ketahanan pangan belum dinilai efektif, Pemerintah Desa Bojongkoneng memberikan bantuan pada waktu yang tidak tepat yaitu di saat petani sudah mulai menanam padi. Tercapainya tujuan program ketahanan pangan belum dinilai efektif, petani belum merasakan manfaat dikarenakan terkendala beberapa bantuan sehingga hasil akhir pertanian tidak mengalami perubahan. Perubahan nyata program ketahanan pangan belum dinilai efektif karena masih terkendala berbagai hambatan dan petani tidak merasakan dampak yang diberikan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan penelitian maka saran yang bisa dilaksanakan adalah Pemerintah Desa Bojongkoneng pembuatan indikator terkait dengan program ketahanan pangan agar hasil dan tujuan dapat ditentukan dan dihitung dengan pasti. Indikator dapat berupa tujuan hasil seperti peningkatan hasil pertanian dibandingkan dengan pertanian sebelumnya. Indikator lain seperti bagaimana kondisi pertanian sebelum dan sesudah ada bantuan, lalu bantuan pendukung kepada petani lainnya seperti pupuk dan obat-obatan apakah sudah diberikan maksimal. Hingga indikator untuk meninjau apakah pada tahun tersebut terdapat kegagalan panen yang menurun atau meningkat dibanding tahun

sebelumnya, sehingga pemerintah desa dapat menentukan langkah pada tahun berikutnya untuk mengantisipasi jika terjadi gagal panen.

Sosialisasi masif kepada kelompok tani di mana setiap anggota kelompok tani mendapatkan sosialisasi. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dengan menambahkan jadwal sosialisasi seperti 3 bulan sekali diadakan dengan partisipasi lebih banyak dari sebelumnya. Sosialisasi dan bimbingan teknis berpengaruh terhadap hasil dari program ketahanan pangan. Masyarakat perlu diberdayakan agar mandiri, sosialisasi merupakan salah satu cara dalam memandirikan masyarakat untuk melaksanakan pertanian secara produktif.

Dalam sosialisasi terkait dengan pertanian, peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mendampingi serta memfasilitasi petani agar mampu mengimplementasikan praktik pertanian yang lebih maju dan adaptif. Selain itu pemerintah desa sebagai pihak penyelenggara pemerintahan dapat menyusun jadwal sosialisasi dengan baik serta sasaran dari sosialisasi yang lebih luas.

Pemerintah Desa Bojongkoneng dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan yang di khususkan diberikan pada aparatur desa. Program ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kemampuan perencanaan dan penjadwalan program, yaitu salah satunya dalam program ketahanan pangan. Dikarenakan keberhasilan pada suatu program ditentukan oleh kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan programnya. Maka bimbingan teknis atau pelatihan kepada aparatur desa termasuk bagian penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selain itu juga, pelatihan yang dilaksanakan sebaiknya tidak hanya bersifat teknis, namun juga diarahkan pada pembentukan sikap aparatur desa, peningkatan pengalaman, dan kinerja profesional. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya difokuskan bagi petani sebagai sasaran program dan penerima manfaat program, tetapi juga kepada aparatur desa sebagai pelaksana program, agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan responsif.

Ketepatan waktu dalam penyaluran program pemberian bantuan bibit tanaman padi termasuk dalam faktor penting yang akan menentukan keberhasilan suatu program ketahanan pangan. Tujuan dalam program ini adalah pemberian bibit padi yang memiliki nilai serta manfaat. Dikarenakan bibit yang diberikan kepada petani hanya satu kali dalam setahun, namun dalam distribusinya harus disesuaikan dengan jadwal tanam yang berlaku di wilayah sesuai kesepakatan dengan petani. Dikarenakan keterlambatan dalam pemberian bibit tanaman padi akan berpotensi menurunkan kualitas tanaman. Hal ini berkaitan dengan bibit yang diberikan sudah dalam bentuk tanaman muda maka memiliki daya simpan yang terbatas. Oleh karena itu,

dalam menghindari hal tersebut, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan petani melalui Gapoktan, agar Pemerintah Desa Bojongkoneng dapat menyesuaikan jadwal penyaluran bantuan secara lebih responsif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Labolo, M. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Banyumedia Publishing.
- Marliani, L. (2023). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *11*(1), 17-26.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syamsyir, S., & Saputra, N. (2022). *Administrasi Kepegawaian*. CV. Eureka Media Aksara.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2008). *Prospek Pengembangan Desa*.

Jurnal:

- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., Ode, S., & Regif, S. Y. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(1), 1-7.
- Alaslan, A. (2016). Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *9*(7), 3-15.
- Amalia, P., Risnawati, R., Adda, H. W., & Fera, F. (2024). Efektivitas Program Inkubasi Terhadap Perkembangan Wirausaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, *2*(2), 281-289.
- Amin, M. (2020). Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, *1*(2), 1-15.
- Andriani, I., Fitri, Y., & Wahyunni, I. (2024). Hubungan Implementasi Program Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dengan Presepsi Masyarakat Mengenai Tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, *27*(01), 1-14.
- Arifianti, R., Taryana, A., & Fordian, D. (2024). PROSES PRODUKSI JERUK PADA PENGUSAHA JERUK DI LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, *7*(4), 165-178.
- Basir, M. A., & Gunawan, I. (2020). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Pemanfaatan Sistem Aplikasi Komputer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 1-6.
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(1), 135-143.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *3*(2), 168-181.
- Gumelar, R., Susanti, E., & Munajat, M. D. E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA CIBURUY KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT TAHUN 2022. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *15*(2), 86-94.
- Jamil, F. R., Ramli, A., & Sudadi. (2023). Konsep Dasar Administrasi Pendidikan, Fungsi dan Ruang Lingkupnya. *Jurnal Penelitian*, *5*(1), 1-9.
- Mesra, R., Wereh, A. C., Kasenda, M. A., & Sidayang, S. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *7*(2), 1-9.
- Mulyantara, D., & Nugroho, A. (2024). Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati Desadalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Seminar Nasional Ilmu Administrasi*, (pp. 1-4). Banten.
- Nurjakiah, Dharma, A. S., & Gunade, D. T. (2024). Efektivitas Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Program Bantuan Beni Tanaman Padi). *Jurnal Kebijakan Publik*, *1*(3), 1-10.
- Rahmi, H., & Jumiaty. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus

- Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-11.
- Sahlan, F., Agustina, N., & Pracita, S. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti. *Jurnal Smiki Economic*, 7(2), 1-12.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *13*(1), 35-48.
- Savitri, D., & Yuliani, F. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 39-54.
- Sumantri, D. A., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 335-344.
- Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan*, 17(5), 8 - 10.
- Sutrisno, A. D. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 1-14.
- Wardhana, A. F., Hakiki, Y. R., & Rahman, D. F. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah : Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 1-5.
- Wiratma, D. M., & Simangunsong, F. (2023). Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 1-3.
- Wulandari, B. R., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Desa Wanasaba. *4*(1), 1-4.
- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), -6.